



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: helpdesk.lib@unsyiah.ac.id

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

TITLE

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMURANG NOMOR 61/ PID.B/ 2014/PN.AMR TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM

ABSTRACT

Pada putusan nomor 61/Pid.B/2014/PN.Amr, terdakwa Rolli Mahuri Alias Loli melakukan penusukan terhadap Korban Romi Rondonuwu Werung dimana akibat dari perbuatannya terdakwa didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam, namun berdasarkan keterangan korban dalam persidangan luka yang dialami korban sebenarnya lebih mengarah pada unsur luka berat yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP yang justru unsur ini tidak terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Selanjutnya Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan jika adanya dua fakta persidangan yang saling bertentangan pada dua alat bukti yang berbeda terkait letak luka korban yaitu berdasarkan Keterangan saksi dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum. Sehingga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana yaitu mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya belum dapat terwujud dalam putusan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sudah tepat atau tidaknya penggunaan dasar hukum yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan menjelaskan mengapa pertimbangan hakim dibuat tanpa melihat fakta-fakta persidangan secara runtut dan proposional. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (normative legal research) melalui pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan serangkaian kegiatan membaca peraturan, perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan, akibat dari penusukan tersebut korban terganggu untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagai tani, hal ini termasuk dalam salah satu pengertian luka berat pada Pasal 90 KUHP yaitu "ceterus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan" dimana seharusnya Pasal 351 ayat (2) KUHP yang tepat digunakan sebagai dasar dari dakwaan jaksa karena unsur luka berat termasuk di dalamnya. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, korban ditusuk pada bagian belakang sebelah kanan tubuh korban, sementara hasil Visum Et Repertum menyatakan korban mengalami luka tusuk pada bagian tubuh pada dada kiri, dari kedua alat bukti tersebut terdapat fakta hukum yang saling bertentangan, namun hakim justru menempatkan hasil Visum Et Repertum sebagai dasar pertimbangannya tanpa alasan yang jelas mengapa hakim mengenyampingkan fakta hukum pada keterangan saksi, karena itu hakim membuat pertimbangan tanpa melihat fakta-fakta persidangan secara keseluruhan. Disarankan Jaksa Penuntut Umum untuk teliti dalam merumuskan setiap unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, dan dalam setiap putusan tidak hanya termuat dasar hukum saja, hakim harus menyertakan penjelasan tertentu dalam pertimbangannya demi menjelaskan dasar dari putusan tersebut seperti yang dimaksud dalam Pasal 50 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.